



RENCANA KINERJA (RENJA) TAHUN 2022

**DINAS SOSIAL
KABUPATEN NATUNA**

KATA PENGANTAR

Segala puji kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2022 dapat terselesaikan. Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial dan bersifat indikatif.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2022 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Beberapa hal yang diperlukan sebelum dilakukannya Penyusunan Renja Dinas Sosial Tahun 2022 adalah :

1. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.
2. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, dan realisasi Renstra mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan/atau realisasi APBD

Renja Dinas Sosial merupakan penjabaran dari Renstra yang mengacu pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Natuna, yang selanjutnya akan memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Dinas Sosial dalam satu tahun anggaran. Dokumen ini diharapkan mampu menjawab isu-isu strategis dan permasalahan dalam rangka mencapai tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, dan target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Natuna telah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Ranai, 15 Juli 2021

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Natuna



PURYANTI, SP

Pembina Tk.I

NIP. 19750706 200003 2 008

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	1.1 Latar Belakang.....	1
	1.2 Landasan Hukum.....	3
	1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
	1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN LALU.....	6
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun Lalu dan Capaian Renstra.....	6
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan.....	9
	2.3 Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.....	11
	2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKP.....	12
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	12
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	13
	3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	13
	3.2 Tujuan dan Sasaran.....	15
	3.3 Program dan Kegiatan.....	17
BAB IV	PENUTUP.....	27

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Natuna yang kemudian dijabarkan dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 62 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Natuna adalah merumuskan, mengkoordinasikan, dan menetapkan kebijakan daerah di bidang Sosial.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan, meliputi perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di Bidang Rehabilitasi, Perlindungan, dan Jaminan Sosial, dan Bidang Pemberdayaan Sosial Penanganan Fakir Miskin;
- c. Pelaksanaan pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Sosial;
- d. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian di bidang Sosial;
- e. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya; dan
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Dinas Sosial merupakan penjabaran Renstra Dinas Sosial yang mengacu pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Natuna. Renja Dinas Sosial memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Dinas Sosial dalam satu tahun anggaran sekaligus menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya. Selain itu Renja Dinas Sosial Mengakomodasikan hasil Musrenbang RKPD dan Forum Perangkat Daerah.

1. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Persiapan Penyusunan Renja Dinas Sosial mencakup :

- a. Penyusunan rancangan Keputusan Kepala Dinas Sosial tentang pembentukan tim penyusun Renja
- b. Orientasi mengenai Renja
- c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja
- d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah

2. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah

Aktivitas dalam penyusunan Rancangan Renja Dinas Sosial meliputi :

a. Perumusan Rancangan Renja

Perumusan rancangan Renja Dinas Sosial mencakup :

- Pengolahan data dan informasi
- Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu berdasarkan Renstra
- Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi
- Telaahan terhadap rancangan awal Renja
- Perumusan tujuan dan sasaran
- Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat
- Perumusan kegiatan prioritas
- Penyajian awal dokumen rancangan Renja
- Penyempurnaan rancangan Renja
- Pembahasan Forum Perangkat Daerah
- Penyesuaian dokumen rancangan Renja sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah

b. Penyajian Rancangan Renja

3. Forum Perangkat Daerah

Forum Perangkat Daerah bertujuan untuk penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Natuna berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan. Dalam Forum Perangkat Daerah ini rancangan Renja Dinas Sosial dibahas, sehingga diperoleh masukan perbaikan program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah.

4. Penetapan Renja SKPD

Pada tahap ini, rancangan Renja Dinas Sosial yang telah disempurnakan dan sesuai dengan RKPD kepada Bupati untuk memperoleh pengesahan dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Renja Dinas Sosial memiliki keterkaitan dengan dokumen RKPD Kabupaten Natuna, Renstra Dinas Sosial, dengan Renja Kementerian/Lembaga. Penyusunan Renja mengacu pada Rancangan Awal RKPD, dan memperhatikan dokumen Renstra Dinas Sosial tahun 2016-2021 serta Renstra Kementerian/Lembaga tahun 2015-2019. Renja Dinas Sosial selanjutnya menjadi bahan dalam penyusunan RKA dan DPA.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai Berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Natuna Nomor 61 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 61);
13. Peraturan Bupati Natuna Nomor 30 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 30);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Sosial Kabupaten Natuna tahun 2022 sebagai berikut :

1. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja adalah penjabaran tujuan, sasaran dan program kegiatan Dinas Sosial ke dalam rencana tahunan guna memberikan arah dalam menunjang pelaksanaan pembangunan daerah.

2. Tujuan

Rencana Kerja ini disusun dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Menjabarkan tujuan, sasaran strategi dan kebijakan Dinas Sosial ke dalam program dan kegiatan tahunan sesuai dengan isu dan permasalahan mendesak dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial
- b. Menetapkan tolak ukur dan target kinerja program dan kegiatan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi kinerja tahun 2020

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Sosial Kabupaten Natuna tahun 2022 sebagai berikut :

- BAB I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan
- BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu, berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah; Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah; Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi perangkat daerah; Review terhadap Rancangan Awal RKPD; dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Tahun 2022; berisi tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional; Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah; Program dan Kegiatan tahun 2022
- BAB IV Penutup, berisi tentang kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2022

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL
KABUPATEN NATUNA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial tahun 2020 menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Sosial Kabupaten Natuna berjalan dengan baik. Dinas Sosial Kabupaten Natuna mengelola anggaran belanja langsung sebesar Rp 4.625.908.834,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 4.224.530.662,00 atau sebesar 91,32%.

Berikut ini diuraikan mengenai hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun 2020 dan capaian Renstra Dinas Sosial Kabupaten Natuna.

A. Daftar program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi:

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan jasa surat menyurat
- Penyediaan jasa kebersihan kantor
- Penyediaan alat tulis kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Penyediaan makanan dan minuman
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
- Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran
- Rapat-rapat koordinasi dalam daerah

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor

c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Kursus dan peningkatan keterampilan aparatur

d. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

- Pendataan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)

- Pendamping program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Program Keluarga Harapan (PKH)

e. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan sosial

- Peningkatan kualitas pelayanan sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
- Pendamping program beras sejahtera (RASTRA)

f. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

- Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat

B. Program/kegiatan yang belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada, karena semua program/kegiatan telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

C. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan yaitu sebagai berikut:

- Komitmen dan kerjasama dari pimpinan unit, pelaksana kegiatan, pejabat pengadaan barang dan jasa sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan waktu yang telah ditetapkan
- Dukungan Perangkat Daerah terkait dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Dinas Sosial Kepulauan Riau

D. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Sosial. Capaian Renstra secara umum telah berjalan dengan baik, dengan capaian pada seluruh kegiatan hampir mencapai 100% sesuai yang direncanakan dalam Renstra.

E. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil pada penyusunan Renja tahun 2022 yaitu: perlu dilakukan sinkronisasi kegiatan untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung capaian target kinerja.

Secara rinci Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Dinas Sosial Tahun 2020 terlihat pada Tabel 2.1:

Tabel 2.1

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Sosial Tahun 2020

Kode	Saaran Pemban Gunan Daerah	Usuan/Bidang Urusan Pembah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2019 s/d 2021 (periode renstra PD)		Target Kinerja Renja/ RKPD OPD Tahun Jabaran (Tahun 2020) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Trilwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD 2020 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2020 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2020		Perangkat Daerah						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19	20				
URUSAN WAJIB																													
SOSIAL																													
1.06.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	Bulan	60	4.116.756.000	36	4.378.515.961	12	1.124.405.674	12	1.124.405.674	3	200.295.243	6	339.901.246	9	600.472.369	12	1.038.235.902	12	1.038.235.902	100,00	92,34	48	5.416.751.863	80,00	131,58	
01.01.		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	Bulan	60	43.200.000	36	23.994.000	12	8.000.000	12	8.000.000	3	1.240.000	6	2.660.000	9	4.700.000	12	7.280.000	12	7.280.000	100,00	91,00	48	31.274.000	80,00	72,39	Dinas Sosial
01.02.		Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi air dan listrik	Bulan	60	43.400.000	36	22.996.000	12	8.000.000	12	8.000.000	3	1.889.000	6	3.304.000	9	5.467.000	12	7.895.000	12	7.895.000	100,00	98,69	48	30.891.000	80,00	71,18	Dinas Sosial
01.08.		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	Bulan	60	265.000.000	36	130.921.550	12	26.602.000	12	26.602.000	3	7.563.000	6	14.210.000	9	21.023.000	12	26.509.000	12	26.509.000	100,00	99,65	48	157.430.550	80,00	59,41	Dinas Sosial
01.10.		Penyediaan barang cetakan dan penggabungan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggabungan	Bulan	60	212.000.000	36	144.307.200	12	35.750.000	12	35.750.000	3	8.813.000	6	15.772.000	9	23.845.000	12	30.403.000	12	30.403.000	100,00	85,04	48	174.710.200	80,00	82,41	Dinas Sosial
01.13.		Penyediaan jasa tenaga pengoperasian kantor	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Paket	14	251.186.000	16	415.495.750	15	376.000.000	15	376.000.000	0	-	0	-	3	159.735.000	6	352.365.000	6	352.365.000	0,00	0,00	22	767.860.750	157,14	309,69	Dinas Sosial
01.15.		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	60	64.800.000	36	36.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	3	1.140.000	6	2.010.000	9	2.760.000	12	5.040.000	12	5.040.000	100,00	50,40	48	41.940.000	80,00	63,33	Dinas Sosial
01.17.		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	Bulan	60	392.500.000	36	123.360.000	12	13.400.000	12	13.400.000	3	1.100.000	6	1.100.000	9	3.516.000	12	6.676.000	12	6.676.000	100,00	49,82	48	130.036.000	80,00	33,13	Dinas Sosial
01.18.		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Koordinasi Perjalanan Dinas ke luar Daerah	OK	115	1.774.584.000	115	1.179.236.300	6	105.900.000	6	105.900.000	6	43.103.120	9	-	0	11	65.713.000	11	65.713.000	183,33	62,05	126	1.240.949.300	109,57	69,93	Dinas Sosial	
01.19.		Penyediaan jasa tenaga pengemudi	Jumlah Pegawai Tetap (PTT)	OK	125	1.070.086.000	173	938.278.600	33	314.853.000	33	314.853.000	9	51.463.923	9	118.877.846	9	170.341.769	12	221.547.302	12	221.547.302	133,33	98,07	12	2.215.473.302	117,10	117,10	Dinas Sosial
01.20.		Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah Koordinasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah	OK	125	1.070.086.000	173	938.278.600	33	314.853.000	33	314.853.000	34	83.983.200	40	181.967.400	87	209.084.600	142	314.807.600	142	314.807.600	99,99	99,99	315	1.253.086.200	252,00	117,10	Dinas Sosial
2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persn	89,92	598.176.000	64,79	268.778.650	65	34.217.472	70	34.217.472	16	3.460.000	16	9.270.000	27	15.300.000	61,41	26.545.042	61,41	26.545.042	87,73	77,58	63,10	295.323.692	70,17	49,37	
02.24.		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional kantor yang diadana	Unit	10	519.376.000	26	225.778.650	2	28.217.472	2	28.217.472	2	3.460.000	2	7.470.000	2	12.250.000	2	21.645.042	2	21.645.042	100,00	76,71	28	247.423.692	280,00	47,64	Dinas Sosial
02.30.		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	60	78.800.000	36	43.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	3	-	6	1.800.000	9	3.050.000	12	4.900.000	12	4.900.000	100,00	81,67	48	47.900.000	80,00	60,79	Dinas Sosial
03.		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Kehadiran Pegawai	Persn	90	-	90	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.02.		Pengadaan dinas beserta kernetagapannya	Jumlah pakuin dinas beserta kernetagapannya	OK	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
03.05.		Pengadaan pakaian khusus dinas tertentu	Jumlah pengadaan pakaian khusus dinas tertentu	OK	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Bersertifikasi	Persn	40	15.000.000	40	15.000.000	0	-	5	14.494.700	0	0	0	0	0	0	0	5	14.494.700	12,50	96,63	5	14.494.700	100,00	117,10	Dinas Sosial	
05.04.		Rumus dan pengkajian ketetapan anggaran	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus	Orang	1	15.000.000	1	15.000.000	0	-	1	14.494.700	0	0	0	0	0	0	1	14.494.700	100,00	96,63	1	14.494.700	100,00	117,10	Dinas Sosial		
15		Meningkatkan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah PKMS yang mendapatkan bantuan kesehatan sosial (PKMS) Lainnya	PKMS	9,8	1.200.000.000	111,12	491.418.750	300	197.345.600	1723,3	197.345.600	468,3	29.247.270	1442,7	33.479.870	1638,9	-	1479,0	195.879.870	1479,0	33.479.870	85,82	16,97	2590,2	524.898.620	264301,94	43,74	
15.04.		Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin	Jumlah orang miskin yang mendapatkan bantuan peralihan usaha	Orang	1	850.000.000	3	491.418.750	1	197.345.600	1	197.345.600	0	29.247.270	0	33.479.870	0	-	1	195.879.870	1	33.479.870	100,00	16,97	4	524.898.620	400,00	61,79	Dinas Sosial
15.10.		Pendataan jera arif yang miskin kesehatan sosial	Jumlah data PKMS	Dokumen	1	850.000.000	3	491.418.750	1	197.345.600	1	197.345.600	0	29.247.270	0	33.479.870	0	-	1	195.879.870	1	33.479.870	100,00	16,97	4	524.898.620	400,00	61,79	Dinas Sosial
15.12.		Kegiatan Pemberian santunan dan bantuan pada	Jumlah PKMS yang mendapatkan santunan	Jawa	905	350.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	Dinas Sosial
15		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase Pemberdayaan PMKS	Persn	10	600.000.000	21,63	335.273.768	0	147.850.000	20	147.850.000	15,12	42.235.740	17,87	69.717.740	16,99	96.777.740	16,99	124.695.080	16,99	124.695.080	84,95	84,34	38,6	459.968.848	386,20	76,66	
15.02.		Kelembagaan	Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan pelatihan	OK	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
15.09.		Pembinaan dan pemberdayaan sosial untuk UJME berkembang	Jumlah KUBE	OK	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
15.13.		Peningkatan Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Program Keluarga Harapan (PKH)	Jumlah Penerima program UEP dan program PKH	Jawa	1167	600.000.000	3102	179.931.240	2000	147.850.000	2000	147.850.000	1948	42.235.740	2169	69.717.740	1965	96.777.740	1965	124.695.080	1963	124.695.080	98,25	84,34	5067	394.628.320	434,19	50,77	Dinas Sosial
16		Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi kesehatan sosial	Persentase PKMS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Persn	45	250.000.000	42,26	1.079.359.825	45	64.769.400	85	64.769.400	25,61	4.769.600	78,88	24.518.700	89,62	43.418.900	80,87	62.818.900	80,87	45.368.700	95,14	70,05	123	1.124.728.525	273,62	449,89	
16.07.		Peningkatan kualitas pelayanan, dan prasarana rehabilitasi kesehatan sosial bagi PMKS	Jumlah penderita gangguan jiwa yang dirawat	Orang	8	250.000.000	16	440.769.761	8	1.950.000	8	1.950.000	0	1.450.000	0	499.800	0	0	0	0	0	1.949.800	0,00	99,99	16	442.719.561	200,00	177,09	Dinas Sosial
16.22.		Peningkatan program bersesjahtera (GASTRA)	Jumlah rumah tangga miskin yang menerima Rstra	KPM	1588	475.250.000	3176	1.598.409.192	3080	62.819.400	3080	62.819.400	1561	3.319.000	1407	24.018.900	2604	43.418.900	2824	62.818.900	2824	43.418.900	91,69	69,12	6000	1.641.828.092	377,83	345,47	Dinas Sosial
16.		Program pelayanan dan rehabilitasi kesehatan sosial	Sarana sosial seperti panti rehabilitasi, panti jompo, dan panti rehabilitasi	OK	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16.15.		Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana panti sosial	Jumlah rumah singgah	OK	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
21.		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan sosial	Persentase lembaga sosial yang aktif	Persn	54,54	2.499.800	50	2.499.800	50	1.994.800	50	1.994.800	50	1.994.800	50	2.498.800	50	0	50	0	50	2.498.800	100,00	99,96	50	2.498.800	100,00	100,00	
21.03.		Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial	Jumlah pelatihan PSKS	PSKS	0	2.499.800	0	2.499.800	0	1.994.800	0	1.994.800	0	0	0	0	0	0	0	0	2.498.800	100,00	99,96	0	2.498.800	100,00	100,00	Dinas Sosial	
21.07.		Pendidikan dan pelatihan bagi pekerja sosial masyarakat	Jumlah Karang Taruna	OK	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
21.09.		Pembinaan dan pemantauan TAGANA dan anggota lapangan sda bencana (SDB)	Jumlah TAGANA dan Anggota KSB	OK	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Natuna pada tahun 2020 secara keseluruhan relatif baik. Hal ini terlihat dari sebanyak 7 indikator program yang ditargetkan dalam Renja tahun 2020, masih ada yang belum mencapai target. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencapaian target kinerja pada urusan Sosial ada yang sudah tergolong baik dan ada yang masih belum baik. Secara rinci capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Natuna disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan (2016)	Target Kinerja Akhir Renstra (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Tahun Renstra 2020		
					Target Kinerja Renja tahun 2020	Realisasi Kinerja Renja tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2020 (%)
Program pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	Bulan	12	24	12	12	100
Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	%		70	70	61,41	87,72
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase aparatur yang bersertifikasi	%		40	40	5	12,5
Program pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan	Jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan kesejahteraan sosial(jiwa)	Jiwa		18288	17233	14790	85,82

Sosial (PMKS) Lainnya							
Program pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Persentase Pemberdayaan PMKS	%	21,63	26,27	20	16,99	84,95
Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	42,46	65	85	80,87	95,14
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan sosial	Persentase lembaga sosial yang aktif	%	25	50	50	50	100

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan Dinas Sosial, kajian hasil evaluasi pelaksanaan perangkat daerah, serta kajian terhadap pencapaian kinerja renstra perangkat daerah, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Natuna. Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun sebelumnya, serta capaian kinerja renstra perangkat daerah.

Sebelum dirumuskan isu penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, akan dijelaskan dahulu beberapa hal yang perlu dipertimbangkan yaitu sebagai berikut:

- a. Beberapa permasalahan dalam peningkatan pelayanan Dinas Sosial adalah sebagai berikut:
 - Masih tingginya masalah sosial masyarakat yang belum tertangani
 - Tingkat kemiskinan yang masih tinggi dan menjadi permasalahan sosial di daerah dan nasional
 - Banyaknya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial, tetapi cakupannya penanganannya masih rendah
 - Terbatasnya sarana komunikasi dan angkutan dalam upaya penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang disebabkan oleh kondisi geografis Kabupaten Natuna yang berbentuk kepulauan
 - Belum optimalnya pemberdayaan PSKS
- b. Tantangan dalam meningkatkan pelayanan Dinas Sosial adalah sebagai berikut:
 - Adanya perubahan kebijakan dari tingkat pusat yang belum tentu sesuai dengan kondisi daerah
 - Kurangnya sinkronisasi regulasi yang ada baik antara Kementerian Sosial, OPD terkait dan regulasi daerah
 - Kurangnya SDM dan personil yang menangani permasalahan sosial secara khusus

c. Peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Sosial adalah sebagai berikut:

- Adanya dukungan Program dan Anggaran baik dari pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk mendorong program percepatan pengentasan kemiskinan di daerah khususnya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dan inklusivitas bagi penduduk miskin dan rentan, penyandang disabilitas, dan kelompok marjinal lainnya.
- Kuatnya komitmen pemerintah daerah dalam hal perlindungan sosial
- Adanya sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan dasar

Beberapa isu penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Natuna sebagai berikut :

- Masih tingginya masalah kesejahteraan sosial
- Belum optimalnya pemberdayaan PSKS
- Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung PMKS

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan dokumen RKPD Dinas Sosial Kabupaten Natuna tahun 2020, secara umum telah sesuai dengan hasil analisis kebutuhan. Hal ini terlihat dari rumusan program dan kegiatan dalam rancangan awal RKPD sudah selaras dan anggarannya telah sesuai dengan kebutuhan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dapat memberikan perubahan mendasar terhadap perubahan perilaku penerima manfaat layanan atau merubah dari ketidakmampuan (*powerlessness*) menjadi memiliki kemampuan (*powerfull*). Selain itu juga diarahkan pada upaya untuk menumbuhkan kepedulian dan nilai kesetiakawanan social masyarakat sehingga terwujud ketahanan social masyarakat.

Kementerian Sosial sebagai pilar pemerintah memiliki peran strategis untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh penduduk Indonesia, sesuai dengan peran dan fungsinya Visi Misi Kementerian Sosial selama 5 tahun kedepan (2015-2019) adalah :

**“ TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN
BERLANDASKAN NILAI DAN SEMANGAT GOTONG ROYONG“**

Bangsa yang berdaulat dan mandiri adalah bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Sementara kemandirian suatu bangsa tercermin pada ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan kemajuan pembangunannya dalam kerangka kesejahteraan penduduk; kemandirian aparatur pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya; kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang disertai dengan keunggulan dalam inovasi, kreativitas, integritas dan etos kerja sumber daya manusia; kemampuan untuk melindungi setiap warga negara dari ketidakberdayaan dan kerentanan. Kemandirian dalam kebudayaan harus dicerminkan dalam setiap kehidupan, baik hukum, ekonomi, politik, sosial budaya maupun pertahanan keamanan.

Visi besar tersebut diharapkan dapat menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Sebab visi ini tidak hanya menjadikan pembangunan ekonomi sebagai fokus utama, tetapi pembangunan seluruh sendi-sendi kehidupan berbangsa, dimana pembangunan manusia yang mandiri dan berkepribadian sebagai fondasi utama. Ditetapkannya Visi Pemerintahan 2015-2019 yang menekankan pada: berdaulat, mandiri,

dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, merupakan kondisi yang sejalan dengan filosofis Kementerian Sosial dalam mewujudkan kondisi sejahtera.

Upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan nasional (2015-2019) yang juga digunakan sebagai Visi Kementerian Sosial dilaksanakan melalui 7 misi pembangunan nasional yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan penduduk maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri yang bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia yang tinggi, maju dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional; dan
7. Mewujudkan penduduk yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan penduduk dalam memenuhi kebutuhan dasar.
2. Terpenuhinya hak dasar dan inklusivitas bagi penduduk miskin dan rentan, penyandang disabilitas, dan kelompok marjinal lainnya; dan
3. Meningkatnya kualitas manajemen dan pengelolaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Tujuan ini ada dalam kerangka pembangunan nasional saat ini dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Sosial sesuai Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial.

Beberapa permasalahan sosial sebagai berikut :

1. Permasalahan yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi penduduk miskin dan rentan serta kelompok marjinal lainnya
2. Permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan sosial yang belum komprehensif, termasuk membedakan antara asistensi sosial reguler dan sistensi sosial temporer bagi penduduk miskin dan rentan
3. Permasalahan sosial yang berkaitan dengan ketimpangan akses dan penjangkauan pelayanan dasar
4. Permasalahan sosial yang berkaitan dengan terbatasnya akses penduduk miskin dan rentan dalam mengembangkan penghidupan secara berkelanjutan
5. Permasalahan yang berkaitan dengan sumber daya manusia dan kelembagaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang dihadapi. Dengan demikian tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang diharapkan dapat menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan akan menggambarkan kondisi yang ingin dicapai di masa depan dengan lebih mengoperasionalkan pelaksanaan misi. Tujuan juga mencerminkan adanya prioritas program dan kegiatan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Melalui perumusan tujuan diharapkan dapat menunjuk suatu kondisi yang ingin dicapai ke depan atau mengarahkan perumusan sasaran tahunan, arah kebijaksanaan, pogram serta kegiatan. Tujuan Dinas Sosial Daerah Kabupaten Natuna konsisten dengan tugas pokok dan fungsinya secara kolektif menggambarkan arah strategisnya dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, bisa dicapai, rasional untuk jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan demikian Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dalam proses perencanaan strategis. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi.

Sasaran Dinas Sosial merupakan gambaran yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu maksimal 1 (satu) tahun atau kurang dari 1 tahun guna mencapai tujuan yang telah dirumuskan untuk 5 tahun ke depan. Indikator kinerja diperlukan dalam pengukuran atau penilaian keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran. Penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator kinerja melalui sistim pengumpulan dan pengolahan data/informasi untuk menentukan kinerja kegiatan, program dan kebijakan. Penetapan indikator kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Penetapan indikator kinerja tersebut didasarkan pada kelompok menurut masukan (input), keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator kinerja masukan dan keluaran dapat dinilai sebelum kegiatan selesai, karena masukan adalah semua bahan termasuk orang, material, alat, dan uang yang digunakan dalam proses untuk menghasilkan output. Sedangkan keluaran adalah suatu wujud atau keadaan yang diciptakan melalui proses yang mempunyai nilai tambah untuk dimanfaatkan.

Untuk indikator hasil, manfaat, dan dampak akan diperoleh setelah kegiatan selesai, namun perlu diantisipasi sejak tahap perencanaan. Hasil adalah kegunaan langsung dari output atau manfaat suatu output ditinjau dari maksud atau sasaran output tersebut dihasilkan, manfaat adalah kegunaan lebih lanjut yang diharapkan dikaitkan dengan tujuan jangka menengah. Sedangkan dampak adalah kegunaan akhir dari output yang berkaitan dengan tujuan jangka panjang atau tujuan akhir.

Penetapan Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Natuna untuk periode Renstra 2016-2021, beserta indikator capaiannya diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur, dan dapat dicapai. Tujuan Dinas Sosial Kabupaten Natuna adalah Meningkatkan Kesejahteraan Sosial masyarakat. Sedangkan sasaran pembangunan yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial Kabupaten Natuna adalah Menurunnya masalah kesejahteraan sosial.

3.3 Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Natuna pada tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

- a. Mengarah pada pencapaian visi dan misi Bupati sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Natuna tahun 2016-2021
- b. Mengarahkan pada penanganan permasalahan dan isu strategis dalam pelaksanaan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Natuna sebagaimana tertuang dalam Renstra tahun 2016-2021

Secara rinci program dan kegiatan serta Pagu Indikatif yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Natuna tahun 2022 tertuang dalam Tabel berikut ini (Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023).

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023
KABUPATEN NATUNA

NAMA PD : DINAS SOSIAL

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kerja			Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah	
					Program/Outcome	Uraian	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								6.260.245,888	6.453,761,888		
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								6.260.245,888	6.453,761,888		
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				INDEKS KERJASAN PENGUNA	3 INDEKS			4.471,951,888	4.523,761,888		
1.06.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Predikat/Nilai Akuntabilitas	78 Nilai/Predikat	58.210,000	58.210,000		
1.06.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						Jumlah Laporan	2 Laporan	58.210,000	58.210,000		Dinas Sosial
	Laporan Kinerja (LKJ) dan Laporan Keuangan						Jumlah Laporan	2 Laporan	58.210,000	58.210,000		
1.06.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Tepat Waktu	3.039,820,888	3.039,820,888		
1.06.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						Jumlah Pegawai	19 Orang	3.039,820,888	3.039,820,888		Dinas Sosial
	Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai/ASN						Jumlah Pegawai	19 Orang	3.039,820,888	3.039,820,888		
1.06.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Persentase Penyediaan Sarana Administrasi Umum Perangkat Daerah	75,00 %	654.731,000	654.731,000		
1.06.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor						Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	15 Jenis	255.500,000	255.500,000		Dinas Sosial
	Belanja Modal Pengadaan Alat Peningkatan Ruang						Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	1 Jenis	24.000,000	24.000,000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub kegiatan/Output					
					Uraian	TARGET	Uraian	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Belanja Modal Pengadaan Filling Cabinet						Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	1 Jenis	7.500,000	7.500.000	Sedang Berjalan	
	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air						Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	1 Jenis	3.000,000	3.000.000	Sedang Berjalan	
	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC						Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	1 Jenis	45.000,000	45.000.000	Sedang Berjalan	
	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja						Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	1 Jenis	20.000,000	20.000.000	Sedang Berjalan	
	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat						Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	1 Jenis	11.000,000	11.000.000	Sedang Berjalan	
	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tunggu Tamu						Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	1 Jenis	9.000,000	9.000.000	Sedang Berjalan	
	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja						Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	1 Jenis	25.000,000	25.000.000	Sedang Berjalan	
	Belanja Modal Pengadaan Meja Sampung						Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	1 Jenis	3.000,000	3.000.000	Sedang Berjalan	
	Belanja Modal Pengadaan Papan Duk						Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	1 Jenis	5.000,000	5.000.000	Sedang Berjalan	
	Belanja Modal Pengadaan Printer						Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	1 Jenis	15.000,000	15.000.000	Sedang Berjalan	
	Belanja Modal Pengadaan Server (Untuk Aplikasi Data Kemiskinan)						Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	1 Jenis	26.000,000	26.000.000	Sedang Berjalan	
	Belanja Modal Pengadaan Sofa						Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	1 Jenis	10.000,000	10.000.000	Sedang Berjalan	

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Belanja Modal Pengadaan UPS						Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Jenis	4,000,000	4,000,000	Sedang Berjalan	
	Pengadaan Komputer/Notebook						Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Jenis	48,000,000	48,000,000	Sedang Berjalan	
1.06.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kantor	10 Jenis	8,000,000	8,000,000		Dinas Sosial
	Penyediaan Alat dan Bahan Pembersih kantor						Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kantor	10 Jenis	8,000,000	8,000,000	Sedang Berjalan	
1.06.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	400 Kotak	10,800,000	10,800,000		Dinas Sosial
	Penyediaan Makanan dan Minuman						Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	400 Kotak	10,800,000	10,800,000	Sedang Berjalan	
1.06.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						Jumlah Penyediaan Penggandaan Kantor	659,330 Lembar	32,966,400	32,966,400		Dinas Sosial
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						Jumlah Penyediaan Penggandaan Kantor	659,330 Lembar	32,966,400	32,966,400	Sedang Berjalan	
1.06.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2 Jenis	12,000,000	12,000,000		Dinas Sosial
	Belanja Langganan Jurnalkoran/Mejalah						Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2 Jenis	12,000,000	12,000,000	Sedang Berjalan	
1.06.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material						Jumlah Jenis Penyediaan Bahan/Material	12 Jenis	40,354,000	40,354,000		Dinas Sosial
	Penyediaan Alat Tulis Kantor						Jumlah Jenis Penyediaan Bahan/Material	12 Jenis	40,354,000	40,354,000	Sedang Berjalan	
1.06.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28 OK	296,110,600	296,110,600		Dinas Sosial
	Jumlah Perjalanan Dinas						Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28 OK	296,110,600	296,110,600	Sedang Berjalan	
1.06.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Persentase Peningkatan Sarana Penunjang Perkantoran	80,00 %	450,000,000	500,000,000		

NAMA PD: DINAS SOSIAL

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kerja			Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah	
					Program/Outcome		Target					
					Uraian	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.06.012.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kantor	1 Jenis	450.000.000	500.000.000	Dinas Sosial	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Empat Double Cabin						Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kantor	1 Jenis	450.000.000	500.000.000	Sedang Berjalan	
1.06.012.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Peningkatan Kepuasan Pengguna	80,00 %	239.000.000	239.000.000		
1.06.012.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						Jumlah Penyediaan Material Kantor	8.000 Lembar	8.000.000	8.000.000	Dinas Sosial	
	Penyediaan Material Kantor						Jumlah Penyediaan Material Kantor	8.000 Lembar	8.000.000	8.000.000	Sedang Berjalan	
1.06.012.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						Jumlah Tenaga Honorier/PTT	8 Orang	231.000.000	231.000.000	Dinas Sosial	
	Pembayaran Gaji Tenaga Honorier/PTT						Jumlah Tenaga Honorier/PTT	8 Orang	231.000.000	231.000.000	Sedang Berjalan	
1.06.012.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang dipelihara	75,00 %	30.200.000	32.000.000		
	Operasional Kendaraan Dinas						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang dipelihara	2 Unit	24.200.000	25.000.000	Dinas Sosial	
1.06.012.09.02.	Operasional Kendaraan Dinas						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang dipelihara	2 Unit	24.200.000	25.000.000	Sedang Berjalan	
1.06.012.09.1.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang dipelihara	5 Jenis	6.000.000	7.000.000	Dinas Sosial	
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang dipelihara	5 Jenis	6.000.000	7.000.000	Sedang Berjalan	
1.06.02.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL						PERSENTASE PEMBERDAYAAN SOSIAL	40,00 %	200.000.000	200.000.000		
1.06.02.2.03.	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah PSKS yang dikembangkan	5 PSKS	200.000.000	200.000.000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Parangkat Daerah
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub Kegiatan/Output					
					Uraian	Target	Uraian	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.06.02.2.03.01.	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota							Jumlah Peserta Pelatihan dan Pembinaan bagi Pekerja Sosial	150.000.000	150.000.000		Dinas Sosial
	Pelatihan dan Pembinaan bagi Pekerja Sosial							Jumlah Peserta Pelatihan dan Pembinaan bagi Pekerja Sosial	150.000.000	150.000.000	Baru	
1.06.02.2.03.05.	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)							Jumlah LK3 yang Mendapatkan Bantuan	50.000.000	50.000.000		Dinas Sosial
	Pemberian pelayanan kesejahteraan keluarga							Jumlah LK3 yang Mendapatkan Bantuan	50.000.000	50.000.000	Sedang Berjalan	
1.06.04.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					36,00 %			555.000.000	555.000.000		
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial							Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan GEPENG diluar Panti Sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	480.000.000	480.000.000		
1.06.04.2.01.03.	Penyediaan Alat Bantu							Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Memanfaatkan Alat Bantu	150.000.000	150.000.000		Dinas Sosial
	Penyediaan Alat Bantu, (Kursi Roda, Tongkat, Alat Bantu Dengar, Kaki Palsu, Kaca Mata) Untuk Disabilitas							Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Memanfaatkan Alat Bantu	150.000.000	150.000.000	Baru	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kerja			Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah	
					Program/Outcome	Uraian	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.06.04.2.01.05.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang mendapatkan Bimbingan Mental dan Sosial sesuai Standar	100 Orang	150.000.000	150.000.000		Dinas Sosial
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Sesuai Standar						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang mendapatkan Bimbingan Mental dan Sosial sesuai Standar	100 Orang	150.000.000	150.000.000	Baru	
1.06.04.2.01.06.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat						Jumlah Bimbingan Sosial yang dilaksanakan kepada Keluarga dan Masyarakat	90 keluarga	80.000.000	80.000.000		Dinas Sosial
	Pemberian Bimbingan Sosial bagi Keluarga Disabilitas						Jumlah Bimbingan Sosial yang dilaksanakan kepada Keluarga dan Masyarakat	90 keluarga	80.000.000	80.000.000	Sedang Berjalan	
1.06.04.2.01.1.	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang mendapatkan Layanan Penelusuran Keluarga	8 Orang	100.000.000	100.000.000		Dinas Sosial
	Pemberian Layanan Pemulangan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Terlantar						Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang mendapatkan Layanan Penelusuran Keluarga	8 Orang	100.000.000	100.000.000	Sedang Berjalan	
1.06.04.2.02.	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial						Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang direhabilitasi	36,00 %	75.000.000	75.000.000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Peringkat Daerah
					Program/Outcome	Uraian	Target	Kegiatan/Sub Kegiatan/Output				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.06.04.2.02.08.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA						Jumlah Bimbingan Sosial yang dilaksanakan kepada Keluarga PMKS dan Masyarakat	50 keluarga	75.000,000	75.000.000		Dinas Sosial
	Pemberian Bimbingan Bagi Keluarga PMKS						Jumlah Bimbingan Sosial yang dilaksanakan kepada Keluarga PMKS dan Masyarakat	50 keluarga	75.000,000	75.000.000	Sedang Berjalan	
1.06.05.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					75,74 %			608.284,000	750.000.000		
1.06.05.2.02.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						Persentase Desa/Kelurahan yang Aktif Mengupdate Data Terpadu Penanggulangan Kemiskinan	59,74 %	608.284,000	750.000.000		
1.06.05.2.02.01.	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Rumah Tangga dalam DTKS	5.662 Rumah Tangga	158.284,000	150.000.000		Dinas Sosial
	Verifikasi dan Validasi Data Fakir Miskin						Jumlah Rumah Tangga dalam DTKS	5.662 Rumah Tangga	158.284,000	150.000.000	Sedang Berjalan	
1.06.05.2.02.02.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Data PMKS yang dikelola	1 Dokumen	100.000,000	200.000.000		Dinas Sosial
	Pengembangan dan Pengelolaan Data PMKS melalui Aplikasi SI Bakso (Sistem Informasi Basis data Terpadu Kesejahteraan Sosial)						Jumlah Data PMKS yang dikelola	1 Dokumen	100.000,000	200.000.000	Sedang Berjalan	
1.06.05.2.02.03.	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga						Jumlah Keluarga yang menerima Bantuan Sosial	833 keluarga	150.000,000	200.000.000		Dinas Sosial
1.06.05.2.02.03.	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga						Jumlah Keluarga yang menerima Bantuan Sosial	3.786 KPM	200.000,000	200.000.000		Dinas Sosial
	Pemberian Bantuan Sosial Bagi Masyarakat						Jumlah keluarga yang menerima Bantuan Sosial	833 keluarga	150.000,000	200.000.000	Sedang Berjalan	
	Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)						Jumlah Keluarga yang menerima Bantuan Sosial	962 KPM	100.000,000	100.000.000	Sedang Berjalan	
	Pencamping Program Sembako						Jumlah Keluarga yang menerima Bantuan Sosial	2.824 KPM	100.000,000	100.000.000	Sedang Berjalan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kerja			Prakiraan Maju	Jenis Prog & Keg	Perangkat Daerah			
					Program/Outcome		Kegiatan/Sub kegiatan/Output						
					Uraian	Target					Uraian	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1.06.06.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA									375.000.000	375.000.000		
1.06.06.2.01.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/kota					100,00 %				200.000.000	200.000.000		
1.06.06.2.01.01.	Penyediaan Makanan									50.000.000	50.000.000		Dinas Sosial
	Pemberian Makanan bagi Korban Bencana Alam dan Sosial Pasca Kejadian									50.000.000	50.000.000		Sedang Berjalan
1.06.06.2.01.02.	Penyediaan Sandang									50.000.000	50.000.000		Dinas Sosial
	Pemberian Bantuan Sandang Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial Pasca Kejadian									50.000.000	50.000.000		Sedang Berjalan
1.06.06.2.01.04.	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan									50.000.000	50.000.000		Dinas Sosial
	Penanganan yang Diberikan Kepada Kelompok Rentan Pasca Kejadian Bencana Alam dan Sosial									50.000.000	50.000.000		Sedang Berjalan
1.06.06.2.01.05.	Pelayanan Dukungan Psikososial									50.000.000	50.000.000		Dinas Sosial
	Pemberian Layanan Psikososial bagi Korban Bencana Alam dan Sosial Pasca Kejadian									50.000.000	50.000.000		Sedang Berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Lokasi	Indikator Kerja			Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Prog & Ksg	Perangkat Daerah	
					Program/Outcome		Target					
					Uraian	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota						100,00 %	175.000.000	175.000.000			
1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana						1 Desa	75.000.000	75.000.000		Dinas Sosial	
	Pembentukan Kampung Siaga Bencana di Kecamatan						1 Desa	75.000.000	75.000.000	Sedang Berjalan		
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana						14 Peserta	100.000.000	100.000.000		Dinas Sosial	
	Pelaksanaan Pelatihan bagi Taruna Siaga Bencana (Tagana)						14 Peserta	100.000.000	100.000.000	Sedang Berjalan		
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					25,00 %		50.000.000	50.000.000			
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota						100,00 %	50.000.000	50.000.000			
1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota						1 Makam Pahlawan	50.000.000	50.000.000		Dinas Sosial	
	Pemeliharaan dan Perawatan Makam Pahlawan						1 Makam Pahlawan	50.000.000	50.000.000	Sedang Berjalan		
JUMLAH								6.260.245.888	6.453.761.888			

Ranai, 15 Juli 2021



BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2022 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) tahun 2016-2021. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 pada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan urusan sosial yang bermanfaat guna mendukung pencapaian visi Kabupaten Natuna tahun 2016-2021. Untuk mencapai hal tersebut langkah-langkah yang diambil sebagai kaidah pelaksanaan kegiatan yaitu : 1. Seluruh pejabat struktural di Dinas Sosial agar mengawal pelaksanaan Renja tahun 2022 sebaik-baiknya sehingga dapat teranggarkan dan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 2. Pelaksanaan program kerja tahun 2022 harus melalui proses yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah yang berlaku; 3. Guna memastikan pelaksanaan program dan kegiatan Renja berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja tahun 2022. Rencana tindak lanjut dalam merespon dimasa yang akan datang melalui prioritas kegiatannya adalah : 1. Seluruh unsur di Dinas Sosial melaksanakan program dan kegiatan Renja tahun 2022 sebaik-baiknya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. 2. Kepala Dinas dibantu Sekretariat melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2022 guna memastikan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan dengan baik.

Adanya Renja Dinas Sosial Tahun 2022, maka penetapan prioritas pembangunan pada urusan sosial diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan perangkat daerah yang lain. Semoga dengan tersusunnya Renja Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2022, mendorong peningkatan kualitas kinerja dapat perannya sebagai perangkat daerah yang menangani urusan sosial. Selain itu, diharapkan Rencana Kerja tahun 2022 ini mampu mendorong pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Natuna yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2016-2021.